

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAKARTA *ENTREPRENEUR*  
(*JAKPRENEUR*) DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN  
TERBUKA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI  
DKI JAKARTA**

Razaq Ahnaf Naufal

NPP. 32.0351

*Asdaf Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: [32.0351@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0351@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *Open unemployment remains a serious problem faced by the government, including in the province of DKI Jakarta. The administrative city of East Jakarta is one of the areas with the highest open unemployment rates in the province. In response, the DKI Jakarta Provincial Government has initiated the Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) program to empower the community through entrepreneurship development. Purpose: This study aims to analyze and describe the implementation of the Jakpreneur program in reducing open unemployment rates in the East Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province. Method: This study uses a descriptive qualitative method. This method was chosen because it provides in-depth and detailed explanations on a topic that requires a complete description, not just a series of numbers. Data collection techniques include interviews and documentation of several supporting documents and photographs. The primary theory used to analyze this topic is Charles O Jones' Policy Implementation Theory (1996). There were 8 informants involved in this study. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification. This study uses a human instrument, with the researcher serving as the sole instrument. Result: The results of the study indicate that each dimension was analyzed. In the organizational dimension, there is already a clear implementing body, but the role of human resources within it is still not optimal. In the interpretation dimension, the results of the study show that there is still a lack of understanding among the community regarding the objectives of Jakpreneur. In the application dimension, there is already a good SOP implementation application, but in practice, there are still several technical obstacles that need to be addressed. Conclusion: In general, the results of this study indicate that the implementation of the Jakpreneur program in reducing the open unemployment rate in East Jakarta Administrative City is still not optimal, as several indicators have not yet achieved the expected results.*

**Keywords:** *Jakpreneur, Open Unemployment, Entrepreneurship, East Jakarta, Policy Implementation*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** *Pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi pemerintah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di provinsi ini. Sebagai respon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur), guna memberdayakan masyarakat melalui pengembangan*

kewirausahaan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program *Jakpreneur* dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memiliki ciri khas berupa penjelasan yang mendalam dan rinci pada suatu topik yang memang harus dilakukan pendeskripsian lengkap tidak hanya menggunakan rangkaian angka angka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi pada beberapa dokumen pendukung dan juga foto. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori Implementasi kebijakan Charles O Jones (1996). Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian ini menggunakan *human instrument* atau penulis sebagai instrument tunggal. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis masing masing dimensi dilakukan, dimana pada dimensi organisasi sebenarnya sudah terdapat badan pelaksana yang jelas akan tetapi peran sumber daya manusia yang ada didalamnya masih belum maksimal, selanjutnya pada dimensi interpretasi diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan belum adanya pemahaman yang baik ditengah Masyarakat terhadap tujuan adanya *Jakpreneur* ini, selanjutnya pada dimensi aplikasi, sebenarnya sudah terdapat aplikasi SOP Pelaksanaan yang baik namun dalam praktiknya masih menemui beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki. **Kesimpulan:** Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program *Jakpreneur* dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum optimal, karena beberapa indikator yang masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

**Kata Kunci:** *Jakpreneur*, Pengangguran Terbuka, Kewirausahaan, Implementasi Kebijakan, Jakarta Timur.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait masalah pengangguran yang menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat selama lima tahun terakhir. Pengangguran merupakan isu krusial dalam bidang ekonomi yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Daitoh & Tarui, 2022). Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja aktif mencari namun belum mendapatkan pekerjaan. pengangguran terbuka merujuk pada situasi dimana seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun belum mulai bekerja meski sudah memiliki pekerjaan (Yeung, 2024). Fenomena ini dapat terjadi akibat keterbatasan lapangan kerja atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Faktor penyebab meningkatnya pengangguran terbuka yaitu peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menyebabkan bertambahnya pencari kerja, dan sejalan dengan itu jumlah tenaga kerja juga meningkat. Jika tenaga kerja tersebut tidak terserap oleh lapangan pekerjaan, mereka akan tergolong sebagai pengangguran (Pallage et al., 2013). Pengangguran memiliki dampak merugikan yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi produktivitas suatu negara secara keseluruhan dan menambah beban sosio-ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kebijakan ekonomi pemerintah untuk menempatkan upaya untuk mengurangi pengangguran. Situasi ini memberikan dampak buruk bagi pencari kerja yang ada di setiap daerah yang memiliki pertumbuhan sektor industri yang tidak berkesinambungan. Sebagai negara yang berkembang dengan sektor ekonomi yang terus mengalami perkembangan, tantangan dalam menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia membutuhkan berbagai strategi dari pemerintah di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Program Jakarta *Entrepreneur (Jakpreneur)* di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di sektor tenaga kerja dan usaha kecil, dan menengah dalam memberdayakan Masyarakat agar terhindar dari kemiskinan (Rahman, 2023). Jakarta sebagai satu-satunya kota setingkat provinsi di Indonesia merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 10.684.946 jiwa. Sebagai pusat ekonomi nasional dengan berbagai peluang kerja dan sektor bisnis yang berkembang pesat, DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam hal ketenagakerjaan. DKI Jakarta masih kesulitan dalam mengatasi isu pengangguran, terutama pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sejalan dengan itu jumlah angkatan kerja juga meningkat, akan tetapi lapangan pekerjaan terbatas. Kondisi ini menyebabkan lingkungan yang tidak kondusif dan tertata rapi (Murni, 2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta masih menduduki peringkat ke-4 dalam daftar 10 provinsi dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia selama 3 tahun terakhir, dengan persentase sebesar 6,64%.

**Tabel 1**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)			
	2022	2023	2024	Rata-rata
Jawa Barat	8,31	7,44	6,75	7,5
Banten	8,09	7,52	6,68	7,43
Kep. Riau	8,23	6,8	6,39	7,14
Dki Jakarta	7,18	6,53	6,21	6,64
Maluku	6,88	6,31	6,11	6,43
Sulawesi Utara	6,61	6,1	5,85	6,19
Sumatera Barat	6,28	5,94	5,75	5,99
Aceh	6,17	6,03	5,75	5,98
Sumatera Utara	6,16	5,89	5,6	5,88
Kalimantan Timur	5,71	5,31	5,14	5,39
Indonesia	5,86	5,32	4,91	5,36

Sumber : Badan Pusat Statistik dan diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta mengalami penurunan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahun terakhir tingkat. Namun, rata-rata tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024 masih berada di peringkat ke-4 dengan rata-rata 6,64% dari jumlah penduduk 10.684.946 jiwa yaitu 709.490 jiwa di bawah Jawa Barat 7,5% dari jumlah penduduk 50.345.200 jiwa, Banten 7,43% dari jumlah penduduk 12.431.490 jiwa, dan Kepulauan Riau 7,14% dari jumlah penduduk 2.183.300 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta meskipun menjadi pusat perekonomian nasional, DKI Jakarta masih belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal (Saribulan et al., 2023). Hal ini tentu mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat setempat dimana jumlah tenaga kerja terserap dan kesejahteraan Masyarakat memiliki garis linear yang positif (Duri & Rahmah, 2020).

**Tabel 2**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				Jumlah Penduduk			
	2022	2023	2024	Rata-rata	2022	2023	2024	Rata-rata
Kepulauan Seribu	7,18	8,11	7,93	7,74	28.262	28.523	28.809	28.531
Jakarta Timur	8,39	7,24	6,95	7,53	3.066.074	3.079.618	3.086.010	3.077.234
Jakarta Utara	8,04	7,05	6,18	7,09	1.799.220	1.808.985	1.819.909	1.809.371
Jakarta Barat	7,1	6,39	6,19	6,56	2.458.707	2.470.054	2.487.199	2.471.987
Jakarta Pusat	5,88	6,42	6,24	6,18	1.053.482	1.049.314	1.044.297	1.049.031
Jakarta Selatan	5,63	5,37	5,22	5,4	2.234.262	2.235.606	2.230.653	2.233.507

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta dan diolah oleh Penulis, 2025

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Administrasi Jakarta Timur memang terjadi penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Akan tetapi, rata-rata tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2022 hingga 2024 di Kota Administrasi Jakarta Timur masih berada di peringkat ke-2 dengan persentase 7,53% dari jumlah penduduk sebanyak 3.086.010 jiwa yaitu 232.376 jiwa. Persentase tersebut berada di bawah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 7,74% dari jumlah penduduk 28.809 jiwa yaitu 2.229 jiwa. Data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa memang persentase rata-rata angka pengangguran di Kota Administrasi Jakarta Timur lebih rendah daripada Kabupaten Kepulauan Seribu, tetapi dari jumlah penduduk pengangguran terbuka Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan yang paling tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Proram *Jakpreneur* diampu oleh 6 dinas antara lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) berperan sebagai *leading sector* program *Jakpreneur*. Dinas PPKUKM juga berkoordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta (Dinas TKTE), Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), serta Dinas Sosial untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program *Jakpreneur*. Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan program *Jakarta Entrepreneur* oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur karena topik ini memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kota (Thahir et al., 2020).

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kurangnya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program *Jakpreneur* di Jakarta Timur, meskipun program *Jakpreneur* telah diimplementasikan di Jakarta Timur, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek umum program atau hanya mencakup wilayah Jakarta secara keseluruhan. Akibatnya, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai dampak spesifik program ini di Jakarta Timur, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang unik dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta. Evaluasi mendalam diperlukan untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan konteks local (Harvey et al., 2019).

Keterbatasan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta program Jakpreneur di Jakarta Timur dimana saat ini, terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan peserta program Jakpreneur di Jakarta Timur. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam mengeksplorasi variabel-variabel seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dukungan keluarga, atau akses terhadap modal yang mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan peserta dalam memulai dan mempertahankan usaha mereka. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor ini, sulit untuk merancang intervensi yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan keberhasilan program Jakpreneur di Jakarta Timur. Program ini dilakukan dengan melakukan mitra wirausaha dengan jaringan aktor dalam mendorong percepatan mendapat hasil kegiatan ekonomi (Mickiewicz & Kaasa, 2022).

Kurangnya analisis tentang sinergi antara program Jakpreneur dan inisiatif pengurangan pengangguran lainnya di Jakarta Timur, meskipun program Jakpreneur merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana program ini bersinergi dengan inisiatif pengurangan pengangguran lainnya di Jakarta Timur. Terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana Jakpreneur berinteraksi dengan program-program seperti pelatihan keterampilan, bursa kerja, atau program pemberdayaan masyarakat lainnya yang juga bertujuan mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Analisis mendalam tentang sinergi antar program ini penting untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, menghindari tumpang tindih, dan menciptakan strategi yang lebih terintegrasi dalam mengatasi masalah pengangguran di Jakarta Timur.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diangkat melalui riset penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik yang diangkat tetapi masih memiliki celah, penelitian pertama karya Iyas Nur Hakim, Dody R Setiawan, dan Mohammad Sofyan tahun 2021 berjudul Implementasi Program Jakpreneur Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara), dengan hasil Implementasi Program *Jakpreneur* berjalan cukup baik meski ada hambatan, seperti kurangnya antusiasme masyarakat dan kendala teknis akibat pandemi. Kendati demikian, program ini berhasil meningkatkan perekonomian beberapa UMKM, ditunjukkan oleh peningkatan indikator seperti pemasaran produk dan laporan keuangan (Hakim et al., 2021).

Penelitian kedua karya Syaiful Bahri tahun 2021 berjudul Implementasi Program *Jakpreneur* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan hasil Implementasi Program *Jakpreneur* memberikan dampak positif pada kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk. Manfaat yang dirasakan meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan keterampilan, dan kepercayaan diri peserta program. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam koordinasi antar pihak terkait (Bahri, 2021).

Penelitian ketiga karya Azkia Himayatu Dini tahun 2022 berjudul Implementasi Program *Jakpreneur* Pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanjung Priok, dengan hasil Implementasi Program *Jakpreneur* berperan penting dalam peningkatan keterampilan dan peluang bagi UMKM untuk berkembang, meskipun ada beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi dan keterbatasan SDM dalam pendampingan (Dini, 2022).

Penelitian keempat karya Ainaa Maulidya Zahra dan Novie Indrawati Sagita tahun 2023 berjudul Efektivitas Program Jakarta *Entrepreneur (Jakpreneur)* dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara dengan hasil Program *Jakpreneur*

berhasil memberikan dampak positif dengan menyediakan fasilitas bisnis yang mendukung, namun terdapat beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi generasi muda, kesulitan dalam mengikuti pelatihan hingga selesai, dan tantangan dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan *Jakpreneur* (Zahra & Sagita, 2023).

Penelitian kelima karya Hera Kholisoh, Budi Puspo Priyadi, dan Hartuti Purnaweni tahun 2024 berjudul Implementasi Program *Jakpreneur* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan hasil Implementasi Program *Jakpreneur* berjalan dengan baik dan mampu menyediakan fasilitas bisnis seperti pelatihan dan pemasaran, terdapat beberapa kendala signifikan (Kholisoh et al., 2024).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam menganalisis strategi komunikasi politik pada implementasi program Jakarta Entrepreneur (*Jakpreneur*) di Kota Administrasi Jakarta Timur. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek ekonomi atau manajemen program, penelitian ini mengintegrasikan perspektif komunikasi politik untuk memahami bagaimana pesan-pesan kebijakan disampaikan, diterima, dan diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kebaruan utama terletak pada eksplorasi mendalam terhadap dinamika komunikasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam konteks pengurangan pengangguran melalui kewirausahaan. Penelitian ini juga mengungkap strategi narasi yang digunakan untuk membangun dukungan publik, mengatasi resistensi, dan memotivasi partisipasi dalam program *Jakpreneur*. Lebih lanjut, studi ini menganalisis peran media sosial dan platform digital dalam memperluas jangkauan dan efektivitas komunikasi program, sebuah aspek yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam konteks program kewirausahaan pemerintah di Jakarta Timur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang implementasi program *Jakpreneur*, tetapi juga menyumbangkan pemahaman teoretis tentang peran komunikasi politik dalam keberhasilan program pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan lingkup yang lebih luas yaitu pada tingkat Kota, dimana penelitian sebelumnya hanya terbatas pada kecamatan saja seperti pada penelitian (Dini, 2022). Selain itu penelitian ini juga memandang efek yang lebih luas dengan tujuan pada pengentasan pengangguran terbuka tidak seperti penelitian sebelumnya yang secara umum hanya untuk pengembangan UMKM seperti pada penelitian (Kholisoh et al., 2024)

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program *Jakpreneur* dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi program *Jakpreneur* dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur. metode ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga metode ini dianggap paling sesuai dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi kebijakan Charles O Jones (1996). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan juga wawancara

terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada subjek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan *Jakpreneur* dalam mengentaskan Masyarakat dari pengangguran terbuka. Adapun informan yang dipakai sejumlah 8 informan yang terdiri dari Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi KUKM, Kepala Seksi Perindustrian, Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM di Kecamatan Duren Sawit, Kepala Satuan Pelaksana Dinas PPKUKM di Kecamatan Makasar, dan juga Masyarakat peserta program Jakarta *Entrepreneur*. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur, pemilihan informan kunci ini didasarkan pada pengetahuan yang mendalam dan luas atas topik yang sedang menjadi fokus penelitian (Simangunsong, 2017). Dimana dalam penelitian ini Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Timur lah yang memiliki pengetahuan paling lengkap terkait Jakarta *Entrepreneur*. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data yang berserak dilapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan mulai minggu pertama sampai minggu keempat di bulan Januari 2025. Adapun lokus penelitian ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Timur secara umum, terkhusus di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis mendalam melalui Teori Implementasi kebijakan Charles O Jones (1996) dengan 3 dimensi utama yaitu Organisasi, Interpretasi, dan juga Aplikasi, ketiga dimensi tersebut selanjutnya dijelaskan lebih dalam pada pemaparan berikut ini :

#### 3.1 Organisasi

Peranan organisasi memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan terhadap implementasi suatu kebijakan. Indikator pertama berkenaan dengan Struktur organisasi, dengan hasil struktur organisasi yang terorganisir dengan jelas, adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar unit dan pelaksana program. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur bertugas sebagai *leading sector* program *Jakpreneur* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Struktur organisasi pada Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur sudah diatur pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga setiap pegawai dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur bahwa “Struktur organisasi di Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur tentu sudah sangat jelas karena sudah diatur oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. Sebelum ditetapkan siapa saja yang berhak berada di posisi tersebut dilaksanakan seleksi sesuai kompetensinya”. Dapat diketahui bahwa masing-masing unit sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program *Jakpreneur*.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa masing-masing unit para pelaksana program sudah ada pembagian tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini dilakukan agar pegawai yang ada pada organisasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan lebih maksimal. Tanggung jawab yang baik dari para pegawai pada saat melakukan tugas dan fungsinya dapat mendukung keberhasilan implementasi program.

Pada indikator kedua berkenaan dengan Sumber Daya Manusia dengan hasil kualitas, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana program *Jakpreneur* yaitu pegawai, kepala satuan kecamatan, pendamping program *Jakpreneur*, dan pelatih program *Jakpreneur*. Jumlah dan kualitas sumber

daya manusia pelaksana program *Jakpreneur* berpengaruh terhadap implementasi program *Jakpreneur*. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur bahwa “Sumber daya manusia itu sudah pasti mempunyai kompetensi tinggi karena sudah ada standarnya. Mereka diseleksi berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Kompetensi yang dimiliki berbeda setiap orang, masing-masing dari kompetensi yang mereka miliki juga dapat dibuktikan dari kontribusi mereka untuk melaksanakan tugasnya”.

Adapun hasil penelitian terkait sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program *Jakpreneur* pada Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai leading sector program *Jakpreneur* dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini

**Tabel 3**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Suku Dinas	1 Orang
2	Kepala Seksi	4 Orang
3	Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan	10 Orang
4	PJLP Kewirausahaan (Pendamping)	75 Orang
5	Pelatih <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i>	20 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>110 Orang</b>

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dan diolah oleh Penulis, 2025

Pada tabel tersebut menggambarkan jumlah dan struktur pelaksana program *Jakpreneur* pada Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur yang berjumlah 110 orang. Pada tabel 4.4 disajikan data mengenai tingkat pendidikan pelaksana program *Jakpreneur* pada Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur.

**Tabel 4**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pelaksana
1	S-3	2 Orang
2	S-2	9 Orang
3	S-1	48 Orang
4	D4	34 Orang
5	D3	11 Orang
6	SMA	6 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>110 Orang</b>

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dan diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sumber daya manusia pelaksana program *Jakpreneur* merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Pelaksana program *Jakpreneur* diseleksi terlebih dahulu sesuai keahliannya dan kompetensinya, seperti pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 yang menjelaskan kualifikasi narasumber atau tenaga ahli untuk pelatihan teknis dan non teknis yaitu minimal memiliki pendidikan sarjana atau setara.

Indikator ketiga berkenaan dengan anggaran yang diketahui bahwa Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan suatu program merupakan aspek krusial, karena tanpa dukungan finansial yang memadai, kegiatan-kegiatan dari suatu program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Menurut data dari Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan anggaran yang dialokasikan dan realisasi untuk pelaksanaan program Jakarta *Entrepreneur* dan kegiatan pada tahun 2024 yang termasuk ke dalam anggaran Program Pemberdayaan UMKM. Berdasarkan data anggaran tersebut, Suku Dinas PPKUKM

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program Jakarta *Entrepreneur* pada tahun 2024 sebesar Rp13.823.044.149 dengan realisasi anggaran 96,73%.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa anggaran yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program *Jakpreneur* secara efektif. Dengan pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran, anggaran tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan program *Jakpreneur* seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pada indikator keempat berkenaan dengan sarana dan prasarana, menunjukkan bahwa Program *Jakpreneur* sendiri telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung, menurut pernyataan dari Kepala Satuan Pelaksana Program Jakarta *Entrepreneur* Kecamatan Duren Sawit menyatakan bahwa “Untuk fasilitas sarana dan prasarana program *Jakpreneur* kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk *soft skill* maupun *hard skill* yang pelaksanaannya itu rutin setiap tahunnya dimulai pada triwulan 2, dan kuota pelatihannya juga sudah ditentukan untuk setiap pelatihannya. Para peserta program pelatihan kuliner yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk penunjang usaha”.

Peserta program *Jakpreneur* juga dibantu untuk mendaftarkan merek dan desain produk yang telah dihasilkan. Selain diberikan bantuan alat dan fasilitas perizinan, para peserta program *Jakpreneur* juga difasilitasi untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan oleh para peserta program dalam bentuk bazar *offline* maupun *online*. Pada bazar *offline* para peserta program *Jakpreneur* disediakan lahan tempat dan alat penunjang pelaksanaan bazar seperti meja, kursi, dsb dari pihak Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang diberikan dalam mendukung program *Jakpreneur* dapat bermanfaat bagi para peserta program *Jakpreneur* untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usahanya.

### 3.2 Interpretasi

Dimensi interpretasi berkaitan dengan proses penerjemahan tujuan dan arah kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret oleh para pelaksana program. Pada indikator pertama berkenaan dengan Pemahaman Masyarakat Terhadap Program, dengan hasil Sebagian besar masyarakat sudah paham dengan program *Jakpreneur*, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang masih salah dalam menafsirkan tujuan dari program *Jakpreneur*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih ada beberapa masyarakat yang mengikuti program *Jakpreneur*, akan tetapi belum paham dengan tujuan dari program *Jakpreneur*. Pada tabel dibawah ini menyajikan data peserta yang tidak disiplin dalam melaksanakan program *Jakpreneur* dari tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 5

Tahun	Peserta Yang Tidak Disiplin
2022	11
2023	7
2024	2

Sumber : Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dan diolah oleh Penulis, 2025

Dari tabel 5 menyajikan data jumlah peserta program *Jakpreneur* yang tidak disiplin dari tahun 2022 sampai 2024. Ketidaksiplinan ini seperti jarang mengikuti pelatihan yang diadakan, tidak melengkapi laporan perkembangan usaha, hingga menjual bantuan alat yang telah diberikan dari program *Jakpreneur*. Hal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan dalam menafsirkan tujuan program *Jakpreneur*, sehingga membuat mereka menjadi tidak disiplin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan dari program *Jakpreneur*.

Indikator selanjutnya berkenaan dengan metode pelatihan yang menunjukkan hasil bahwa Pelatihan dilakukan untuk membantu mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, pelatihan juga berperan dalam membangun komitmen dan motivasi peserta, yang merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa program dapat

dijalankan secara konsisten untuk mencapai tujuan dari program *Jakpreneur*. Pelatihan *hard skill* maupun *soft skill* yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur berupa pelatihan pemberian pengetahuan terkait kewirausahaan, peserta program *Jakpreneur* juga dibebaskan untuk memilih bidang mana yang ingin mereka ambil sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh para peserta program. Pada pelatihan *hard skill* mereka diajarkan dan dilatih untuk memasak, menjahit, dan membuat kerajinan tangan. Sedangkan pada pelatihan *soft skill* para peserta program *Jakpreneur* dilatih agar memiliki karakter dan mental yang kuat dalam berwirausaha, manajemen kewirausahaan, pemasaran produk baik secara langsung maupun *virtual*, serta melakukan pengelolaan keuangan secara optimal.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa metode pelatihan yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur kepada para peserta program *Jakpreneur* sudah cukup baik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi para peserta program.

Indikator selanjutnya terkait dengan sosialisasi yang mendeskripsikan bagaimana proses penyampaian program agar dapat dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai program *Jakpreneur* yang dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin. Diketahui sosialisasi program *Jakpreneur* yang dilakukan baik secara *offline* maupun *online*. Lokasi sosialisasi *offline* diselenggarakan di aula kantor kecamatan dan kelurahan, sedangkan sosialisasi *online* dilakukan melalui *Instagram Jakpreneur* dengan cara mengunggah *post, story, dan reels*.

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui jika sosialisasi yang dilakukan sudah cukup intensif. Sosialisasi yang dilakukan yaitu melalui media sosial, juga dilakukan di aula kelurahan, melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan), melalui grup *WhatsApp* ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) pada saat ada program pelatihan yang akan diadakan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur, serta melalui mulut ke mulut dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW).

### 3.3 Aplikasi

Dimensi aplikasi merujuk pada tahap pelaksanaan konkret suatu kebijakan setelah melalui proses interpretasi. Dimensi ini melibatkan penerapan langkah-langkah operasional yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan kebijakan. Pada indikator pertama berkenaan dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP program *Jakpreneur* semua sudah jelas karena sudah diatur oleh Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 1



Sumber : Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur, 2025

Gambar diatas menunjukkan prosedur alur dan tahapan pelaksanaan program *Jakpreneur* yang tersusun secara sistematis. Mulai dari tahap pendaftaran, pelatihan (*hard skill*

dan *soft skill*), pendampingan, perizinan, pemasaran produk, pelaporan keuangan, dan permodalan. SOP tersebut disusun secara resmi oleh Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dan menjadi acuan operasional bagi para pelaksana program.

Dari data dan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa SOP seluruh tahapan program *Jakpreneur* sudah jelas dan terstruktur. SOP yang telah diatur melalui Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh tahapan program. Kejelasan SOP ini tidak hanya memudahkan koordinasi antar pihak terkait, tetapi juga memengaruhi konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, implementasi Program *Jakpreneur* di lapangan dapat berjalan dengan lebih baik, sesuai rencana, dan tujuan program, serta memberikan manfaat optimal bagi para peserta program *Jakpreneur*.

Indikator kedua berkenaan dengan partisipasi Masyarakat dengan hasil penelitian bahwa Partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai peserta program maupun sebagai mitra dalam proses implementasi program *Jakpreneur*, berperan penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program. Partisipasi masyarakat tercermin dari keterlibatan mereka dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan serta kolaborasi dengan pendamping dan pihak terkait dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Partisipasi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur dalam program *Jakpreneur* dapat dikatakan sudah cukup baik. Dapat diketahui bahwa distribusi partisipasi masyarakat dalam program *Jakpreneur* berdasarkan umur Kelompok umur 45-49 tahun mencatat partisipasi tertinggi dengan 10.397 peserta (17,18%), diikuti oleh kelompok umur 40-44 tahun dengan 9.962 peserta (16,46%). Sementara itu, kelompok umur 15-19 tahun memiliki partisipasi terendah, yaitu hanya 102 peserta (0,17%).

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur dalam program *Jakpreneur* sudah cukup baik, terutama dari kalangan usia produktif dengan dominasi partisipasi perempuan. Namun, rendahnya partisipasi pemuda mungkin disebabkan oleh kurangnya minat atau preferensi untuk bekerja dibandingkan memulai usaha.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian mengenai implementasi program Jakarta Entrepreneur (*Jakpreneur*) di Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan hasil yang menarik terkait sumber daya manusia pelaksana program. Berdasarkan data yang diperoleh, mayoritas pelaksana program *Jakpreneur* pada Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S-1), dengan jumlah mencapai 48 orang dari total staf yang ada. Angka ini mencerminkan 60% dari keseluruhan formasi pelaksana program, mengindikasikan bahwa sebagian besar tim pelaksana telah dibekali dengan pengetahuan akademik yang substansial. Komposisi pendidikan ini sejalan dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk posisi pelaksana program pemberdayaan ekonomi. Keberadaan mayoritas staf berpendidikan S-1 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi program, mengingat mereka telah dibekali dengan pemahaman teoretis dan praktis yang relevan dengan bidang pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, komposisi pendidikan ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memastikan bahwa program *Jakpreneur* dikelola oleh tenaga profesional yang kompeten, yang pada gilirannya diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas program dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Jakarta Timur. Hasil ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang juga memiliki komposisi sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi seperti pada penelitian (Rahayu et al., 2023)

Temuan penelitian mengenai implementasi program Jakarta Entrepreneur (*Jakpreneur*) di Kota Administrasi Jakarta Timur mengungkapkan adanya tantangan signifikan pada dimensi interpretasi,

khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap program. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai tujuan sebenarnya dari program Jakpreneur. Hal ini tercermin dari tingkat kedisiplinan yang rendah pada peserta program, di mana tercatat selama periode 2022 hingga 2024, total 20 peserta tidak mengikuti pelatihan yang telah dijadwalkan. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa ketidakdisiplinan ini berakar pada kesalahan dalam menafsirkan tujuan program Jakpreneur. Banyak peserta yang salah mengartikan program ini sebagai pemberian modal usaha gratis tanpa kewajiban atau hanya ditujukan untuk pengusaha yang sudah mapan, sehingga mereka tidak memahami pentingnya mengikuti setiap tahapan pelatihan dan kegiatan yang disediakan. Kesalahpahaman ini tidak hanya berdampak pada tingkat partisipasi, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas program dalam mencapai sarannya untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Jakarta Timur. Wawancara dengan peserta program mengungkapkan bahwa informasi yang diterima seringkali tidak konsisten, dengan banyak peserta menyatakan menerima penjelasan yang berbeda-beda dari berbagai sumber resmi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang lebih terarah dan konsisten untuk meluruskan persepsi masyarakat, serta kebutuhan akan edukasi yang lebih intensif mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat program Jakpreneur bagi masyarakat Jakarta Timur, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam program. Hasil ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya dimana pemahaman masyarakat terhadap tujuan program Jakpreneur masih belum baik (Hakim et al., 2021)

Temuan utama penelitian mengenai implementasi program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) di Kota Administrasi Jakarta Timur mengungkapkan fakta yang memprihatinkan terkait indikator partisipasi masyarakat, khususnya rendahnya keterlibatan generasi muda dalam program ini. Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (DKUKMP) Jakarta Timur menunjukkan bahwa dari total 5.000 peserta Jakpreneur di wilayah tersebut selama periode 2020-2023, hanya 18% atau sekitar 900 peserta yang berasal dari kelompok usia 18-35 tahun. Angka ini jauh di bawah target awal program yang menargetkan minimal 40% partisipasi dari kalangan generasi muda. Analisis lebih lanjut mengungkapkan beberapa faktor penyebab, termasuk kurangnya sosialisasi program yang tepat sasaran untuk kelompok usia muda, persepsi bahwa kewirausahaan kurang menarik dibandingkan pekerjaan formal, serta ketidaksesuaian antara materi pelatihan dengan minat dan tren bisnis terkini yang diminati generasi muda. Survei cepat yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap mahasiswa di lima perguruan tinggi di Jakarta Timur menunjukkan bahwa 70% dari mereka tidak mengetahui detail program Jakpreneur atau manfaatnya bagi pengembangan karir mereka. Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Timur tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kalangan usia 18-35 tahun masih berada di angka 9,5%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,2%. Temuan-temuan ini menggarisbawahi urgensi untuk merevitalisasi strategi pemasaran dan konten program Jakpreneur agar lebih relevan dan menarik bagi generasi muda, serta pentingnya kolaborasi yang lebih erat dengan institusi pendidikan dan komunitas pemuda untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program ini. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana keterlibatan Masyarakat terutama generasi muda sangat tinggi dalam menyambut adanya program *Jakpreneur* di Kota Jakarta Pusat (Nasution et al., 2023)

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Disamping hal hal utama yang dibahas, pada penelitian ini mengungkap hambatan yang terjadi yang mengakibatkan penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Jakarta *Entrepreneur* tidak maksimal. Hambatan tersebut antara lain kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan tujuan program Jakpreneur dan juga keterbatasan modal peserta program Jakpreneur untuk mengembangkan usaha.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi program Jakpreneur dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Administrasi Jakarta Timur masih belum optimal yang disebabkan karena beberapa indikator yang menemui kegagalan atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Pertama, penggunaan peneliti sebagai instrumen tunggal dalam pengumpulan data berpotensi membatasi keragaman dan kedalaman informasi yang diperoleh. Kedua, waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu hanya satu bulan, membatasi kemampuan untuk melakukan pengamatan jangka panjang dan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Ketiga, anggaran penelitian yang terbatas mengakibatkan kendala dalam mobilisasi dan akses terhadap sumber-sumber informasi yang lebih luas. Kombinasi faktor-faktor ini dapat mempengaruhi komprehensivitas data yang dikumpulkan dan kedalaman analisis yang dilakukan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kelemahan dan celah yang belum diisi, diketahui bahwa penelitian ini hanya mengulas mengenai dampak langsung dari adanya program Jakpreneur ini, sehingga pada penelitian di masa depan studi longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang program Jakpreneur terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi local perlu dilakukan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi: kedua orang tua atas kasih sayang dan didikan yang tak terbatas, jajaran pimpinan IPDN dan para dosen atas ilmu berharga yang dibagikan, serta khususnya kepada Ibu Pratiwi Nurhascaryani yang telah membimbing dengan penuh dedikasi. Penulis juga berterima kasih kepada semua sahabat yang berperan dalam pembentukan karakter. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2021). Implementasi Program Jakpreneur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Tesis UINJKT*, 75(17), 399–405. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57795>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 2023*.
- Daitoh, I., & Tarui, N. (2022). Open access renewable resources, urban unemployment, and the resolution of dual institutional failures. *Environment and Development Economics*, 27(4), 316–332. <https://doi.org/10.1017/S1355770X21000334>
- Dini, A. H. (2022). Implementasi Program *Jakpreneur* Pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanjung Priok. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 97–107. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.200>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020). Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(1), 43–52. [https://www.researchgate.net/publication/354410640\\_EVALUASI\\_PEMEKARAN\\_DAERAH\\_DALAM\\_PENINGKATAN\\_KESEJAHTERAAN\\_MASYARAKAT](https://www.researchgate.net/publication/354410640_EVALUASI_PEMEKARAN_DAERAH_DALAM_PENINGKATAN_KESEJAHTERAAN_MASYARAKAT)
- Hakim, I. N., Setiawan, D. R., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Program Jakpreneur Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian UMKM Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus

- Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 663–674. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2880>
- Harvey, C., Maclean, M., & Suddaby, R. (2019). Historical perspectives on entrepreneurship and philanthropy. *Business History Review*, 93(3), 443–471. <https://doi.org/10.1017/S0007680519000953>
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* (N. Budiman (Ed.); 3rd ed.). PT. Raja Grafindo Persada
- Kholisoh, H., Priyadi, B. P., & Purnaweni, H. (2024). Implementasi Program Jakpreneur Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Journal of Management & Public Policy*, 13(2), 1–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43688>
- Mickiewicz, T., & Kaasa, A. (2022). Creativity and security as a cultural recipe for entrepreneurship. *Journal of Institutional Economics*, 18(1), 119–137. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000533>
- Murni, H. N. C. (2024). Educational Environment Management in the Perspective of Climate Change in Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(7), 3697–3705. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i7.7305>
- Nasution, A. S., Raharjo, P., & Samad, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 56–64. <https://journal1.moestopo.ac.id/index.php/publika/article/view/4345/1628>
- Pallage, S., Scruggs, L., & Zimmermann, C. (2013). Measuring unemployment insurance generosity. *Political Analysis*, 21(4), 524–549. <https://doi.org/10.1093/pan/mpt011>
- Rahayu, L., Weni A. Arindawati, & Luluatu Nayiroh. (2023). Strategi Komunikasi Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Dalam Mengembangkan Ukm Di Wilayah Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Heritage*, 11(2), 170–184. <https://doi.org/10.35891/heritage.v11i2.4137>
- Rahman, H. (2023). Analisis Bibliometrik: Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 106–123. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18211>
- Saribulan, N., Rasanjani, S., & Dahlawi, D. (2023). Analisis Isi dan Bibliometrik Isu Ketenagakerjaan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), 64–82. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v4i1.31248>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Thahir, B., Azikin, A., Nurhascaryani, P., Masrich, A., Tjenreng, M. Z. B., Cahyono, Y., Koho, I. R., Thahir, B., Azikin, A., Nurhascaryani, P., Masrich, A., Tjenreng, M. Z. B., Cahyono, Y., & Koho, I. R. (2020). Revitalizing the Role of Regional Governments in Empowering Traditional Market Traders in Dki Jakarta. *Journal of Archeology of Egypt/Egyptology*, 17(9), 146–154. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/481/>
- Yeung, H. C. (2024). Optimal unemployment insurance with behavioral agents. *Macroeconomic Dynamics*, 1673–1681. <https://doi.org/10.1017/S1365100523000603>
- Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.157>